

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENTRANSFORMASI STATUS DESA DARI DESA TERTINGGAL MENJADI DESA BERKEMBANG (Studi di Desa Prode SP III Kecamatan Plampang)

Apriadi¹, Dedi Supriadi^{2*}

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: dedi.supriadi@uts.ac.id

Article Info	Abstrak
Article History Received: 19 Mei 2025 Accepted: 26 Agustus 2025 Published: 31 Agustus 2025	<i>Prode SP III Village, Plampang Sub-District, is one of the underdeveloped villages in Sumbawa District. Weak physical and non-physical potential is suspected to be the cause of its underdevelopment. Therefore, this study aims to analyze the efforts of the Prode SP III Village Government in transforming its status from an underdeveloped village to a developing village. This research used a descriptive method with a qualitative approach to describe the steps taken by the village government based on the POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) management principles. Data collection was conducted using direct observation, in-depth interview, and documentation study. The research subjects were the village head, village officials, and community leaders of the Prode SP III Village. The data analysis used is qualitative analysis with the Miles and Huberman model, with the following steps: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that transformation occurred through basic infrastructure development, strengthening the local economy via MSMEs and agriculture, improved access to education and health services, and active community involvement in development processes. Key supporting factors include natural resource potential, community participation, qualified human resources, and institutional support. This study concludes that village transformation depends not only on structural improvements but also on the social and cultural synergy built through participatory development.</i>
Keywords Village Transformation; Developing Village; Management Principles.	

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan nasional. Desa tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif dan strategis dalam menentukan arah, kebijakan, dan implementasi pembangunan berbasis potensi lokal. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dengan wewenang yang lebih besar ini memungkinkan desa untuk menyusun program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat (Handrain *et al.*, 2024).

Dalam paradigma baru pembangunan, desa tidak hanya sebagai objek, tetapi juga berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menikmati manfaat dari pembangunan tersebut. Pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai proses *top-down* yang digerakkan oleh pemerintah pusat semata, melainkan lebih menekankan pada pendekatan partisipatif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti masyarakat desa dianggap sebagai pelaku utama yang memiliki potensi, kapasitas, dan kreativitas dalam mengelola sumber daya lokal demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Amnurdiant *et al.*, 2024).

Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua desa mampu mengoptimalkan kesempatan tersebut, masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Desa tertinggal dimaknai sebagai desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan juga ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya (Benany dan Widyastuty, 2020).

Menurut Nasution dan Hasibuan (2023), desa tertinggal adalah merupakan suatu wilayah yang dimana pembangunannya tidak/belum optimal termasuk pembangunan fisik maupun yang non fisik serta memiliki kendala dan hambatan, dimana di lihat dari sarana prasarana (infrastruktur), keuangan daerah, prekonomian masyarakat, dan SDM yang masih lemah. Desa tertinggal biasanya secara geografis relatif sulit di jangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit di jangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi. Dari sisi sumber daya alam, desa tertinggal biasanya tidak memiliki potensi, atau memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang di lindungi atau tidak dapat dieksploitasi. Sedangkan Dari sisi sumber daya manusia, umumnya masyarakat di desa tertinggal, tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilannya relatif masih rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.

Pada umumnya, suatu desa menjadi tertinggal, karena disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat, seperti kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan. Selain itu, faktor-faktor lain seperti keterbatasan infrastruktur (seperti sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan dan pendidikan), kualitas sumber daya manusia yang rendah, ketergantungan pada sektor pertanian yang masih menggunakan teknologi tradisional, minimnya investasi, dan kendala geografis juga turut berkontribusi pada kondisi ketertinggalan desa (Rasyid *et al.*, 2023).

Transformasi sendiri merupakan perubahan fisik maupun nonfisik berupa bentuk, rupa, sifat, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, transformasi desa berhubungan proses untuk melakukan perubahan yang berorientasi pada pemecahan masalah dan peningkatan struktur dari sektor sosial dan ekonomi untuk menuju desa mandiri. Transformasi dari status desa tertinggal menjadi desa berkembang memerlukan pendekatan komprehensif, yang meliputi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan pemerintahan desa, serta partisipasi aktif masyarakat. Proses ini diukur menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang memperhatikan dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi (lingkungan). Setiap indeks ini memiliki dimensi dan indikatornya masing-masing (Suhartono dan Citra, 2023).

Desa Prode SP III Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, adalah salah satu desa yang pernah mengalami status sebagai desa tertinggal. Desa ini termasuk desa terpencil dengan aksesibilitas yang sulit dijangkau. Selain karena berada jauh dari pusat kecamatan, infrastruktur jalan dari dan menuju ke desa ini tidak memadai. Desa ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterisolasian akses, ketergantungan ekonomi pada sektor primer, serta lemahnya kapasitas kelembagaan lokal. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Desa Prode SP III Kecamatan Plampang menunjukkan langkah-langkah progresif untuk mentransformasikan kondisi desanya secara menyeluruh. Transformasi ini tidak hanya bersifat fisik melalui pembangunan

infrastruktur, tetapi juga sosial dan kelembagaan, seperti penguatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan.

Transformasi ini tidak hanya bersifat fisik melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga sosial dan kelembagaan, seperti penguatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan dasar. Untuk melihat seberapa besar peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di suatu daerah, maka diperlukan indikator yang perlu adanya tolok ukur. Peningkatan ini dapat ditandai dengan adanya perubahan struktur di beberapa bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik maupun budaya.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci mengenai transformasi pembangunan yang telah dilakukan di Desa Prode SP III Kecamatan Plampang untuk mewujudkan desa berkembang. Untuk memahami bagaimana proses perubahan itu terjadi, penting untuk melihat bagaimana peran dan strategi pemerintah desa Desa Prode SP III Kecamatan Plampang dalam mengelola pembangunan. Dalam konteks ini, prinsip manajemen, yaitu POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) sangat relevan untuk menganalisis tata kelola pembangunan desa secara menyeluruh dan terukur. Selain itu, indikator desa berkembang sebagaimana dikemukakan oleh Sukarno (2020) dapat menjadi alat bantu untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan transformasi desa telah dicapai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau kejadian apa adanya tanpa memanipulasi variabel, menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi untuk memahami kenyataan sosial secara mendalam. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh dan rinci mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan dari suatu kejadian atau keadaan yang diamati.

Metode deskriptif kualitatif ini digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam mentransformasi status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Pada penelitian ini akan dijelaskan secara rinci mengenai strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Prode SP III Kecamatan Plampang untuk mewujudkan desa mandiri sebagai manifestasi UU No. 6/2014 tentang Desa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2021), data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif pada penelitian ini merupakan persepsi informan penelitian mengenai upaya pemerintah Desa Prode SP III Kecamatan Plampang dalam mentransformasi status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Menurut Arikunto (2020), data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data pimer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu informan penelitian menggunakan teknik wawancara. Data sekunder digunakan untuk

mendukung data primer yang dikumpulkan dari dokumen, catatan, dan literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang bersedia memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Creswell (dalam Rianto, 2020), informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memiliki informasi penting dan relevan mengenai latar dan situasi penelitian, yang akan memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat Desa Prode SP III Kecamatan Plampang.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data lisan yang dilakukan melalui percakapan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi mendalam dan terstruktur atau tidak terstruktur. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Menurut Mazaya dan Suliswaningsih (2023), wawancara mendalam adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi dan bertukar ide guna penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Selain itu, data yang digunakan pada penelitian ini juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis seperti laporan resmi, artikel, dan arsip desa. Dengan menggunakan dua metode ini, peneliti bisa menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian, yaitu upaya telah dilakukan oleh pemerintah Desa Prode SP III Kecamatan Plampang dalam mentransformasi status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif dengan mengadopsi dan mengadaptasi model interaktif Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Afriani *et al.*, 2024), analisis data kualitatif menggunakan model interaktif memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Penampilan data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menemukan pola atau tema utama dari data. Teknik triangulasi, yang membandingkan data dari berbagai sumber dan metode digunakan pada penelitian ini untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan, serta untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Prode SP III Kecamatan Plampang dalam mentransformasi status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi status Desa Prode SP III dari desa tertinggal menjadi desa berkembang merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan perencanaan strategis, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta optimalisasi sumber daya lokal. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan manajerial POAC yang digunakan oleh Pemerintah Desa sangat efektif dalam mengelola proses transformasi tersebut, terutama jika dipadukan dengan indikator desa berkembang sebagaimana dikemukakan oleh Sukarno (2020).

Implementasi Fungsi Manajerial POAC dalam Transformasi Desa

1. Perencanaan (*Planning*)

Pemerintah Desa Prode SP III Kecamatan Plampang menunjukkan kemampuan merancang pembangunan melalui RPJMDes dan RKPDes berbasis data dan partisipasi. Musyawarah Desa (Musdes) menjadi instrumen utama dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas warga, seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan pengembangan ekonomi. Dokumen perencanaan desa telah disusun secara sistematis, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa berhasil menerapkan prinsip perencanaan partisipatif yang mendorong rasa kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap pembangunan.

Tabel 1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Prode SP III (2022-2028)

No	Bidang/Kegiatan		Volume	Lokasi
Pelaksanaan Pembangunan				
1	Pembangunan	Tugu/Gapura Desa	1 Unit	Desa Prode SP III
2	Peningkatan Jalan Pendidikan Kenangi	Dusun	1 Unit	Desa Prode SP III
3	Pembangunan Drainase Dusun Kenangi	di	1 Unit	Desa Prode SP III
4	Pembangunan jalan usaha tani Muhajirin 1	Dusun	1 Unit	Desa Prode SP III
5	Pembangunan jalan usaha tani, kualitas jalan usaha tani Dusun Muhajirin II		1 Unit	Desa Prode SP III
Jumlah			5 unit	

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian diwujudkan melalui pelibatan berbagai aktor lokal seperti perangkat desa, BPD, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan desa (Karang Taruna, PKK, dan kelompok tani). Struktur organisasi kegiatan pembangunan dibentuk secara formal dan didukung dengan SK Kepala Desa. Setiap kegiatan memiliki tim pelaksana dan penanggung jawab teknis yang telah dibekali pelatihan atau pendampingan. Ini menunjukkan pengorganisasian yang tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis kapasitas.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pada tahap pelaksanaan, pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu fokus utama. Jalan desa yang sebelumnya berupa tanah kini telah dibeton, drainase dibangun untuk mengurangi genangan air, dan sarana air bersih mulai tersedia. Selain itu, pelatihan bagi petani dan pelaku UMKM difasilitasi oleh pemerintah desa bekerja sama dengan instansi eksternal. Pemerintah desa juga mengembangkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk unggulan seperti ternak dan hasil pertanian. Kegiatan sosial seperti posyandu dan pembinaan kader kesehatan turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Evaluasi dilakukan melalui forum musyawarah dusun dan musyawarah desa pertanggungjawaban. Monitoring dilakukan secara berkala oleh tim pelaksana bersama masyarakat. Masyarakat diberi ruang untuk mengkritisi pelaksanaan program melalui forum informal dan media sosial. Transparansi keuangan juga ditingkatkan dengan menempelkan informasi APBDes di balai desa.

Indikator Desa Berkembang

Transformasi yang terjadi di Desa Prode SP III sangat relevan dengan enam indikator desa berkembang menurut Sukarno (2020).

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan jembatan kecil terbukti meningkatkan konektivitas antar dusun dan memperlancar distribusi hasil pertanian. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi desa dan akses layanan publik.

2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemerintah desa mendukung pengembangan UMKM dan kelompok tani. Pendampingan usaha, bantuan alat produksi, dan pelatihan bisnis dasar telah meningkatkan pendapatan keluarga. Keberadaan pasar desa dan digitalisasi promosi produk menjadi upaya lanjutan.

3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Fasilitas PAUD direhabilitasi dan jumlah kader posyandu bertambah. Pemerintah desa memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis dan penyuluhan gizi. Hal ini mendukung indikator SDGs Desa ke-3 dan ke-4 tentang kesehatan dan pendidikan.

4. Keterlibatan Aktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat tidak hanya tampak dalam gotong royong pembangunan, tetapi juga dalam perencanaan dan evaluasi. Hal ini memperkuat tata kelola desa yang inklusif dan demokratis.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

Kelompok tani mulai mengadopsi pola tanam ramah lingkungan dan pemanfaatan air irigasi terkontrol. Pemerintah desa menginisiasi penanaman pohon di bantaran sungai dan pembuatan sumur resapan.

6. Adopsi Teknologi

Digitalisasi mulai diterapkan dalam pelayanan administrasi (surat menyurat melalui sistem aplikasi desa). Selain itu, informasi pembangunan disebarluaskan melalui media sosial resmi desa.

Indikator Keberhasilan Transformasi Status Desa

Keberhasilan transformasi status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang bersifat internal, yang telah muncul secara konkret dalam konteks lokal Desa Prode SP III Kecamatan Plampang. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima faktor utama yang menopang keberhasilan tersebut, yaitu:

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam (SDA) adalah segala materi dan energi yang ditemukan di alam, baik yang berasal dari makhluk hidup (hayati) maupun yang bukan (non-hayati), dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan serta menciptakan kesejahteraan. SDA memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Irham *et al.*, 2024).

Desa Prode SP III memiliki kekayaan sumber daya alam berupa lahan pertanian produktif, potensi peternakan, dan sumber air bersih. Potensi ini menjadi basis pembangunan ekonomi lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Akses terhadap lahan pertanian yang luas serta ketersediaan irigasi sederhana membantu meningkatkan produksi pertanian, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga. Dengan memanfaatkan SDA secara bijak, desa mampu memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan menopang pembangunan infrastruktur dasar.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset penting berupa orang-orang yang bekerja dalam sebuah organisasi, dengan segala keterampilan, pengetahuan, dan daya pikir yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. SDM menjadi penggerak utama organisasi, melampaui elemen lain seperti modal atau teknologi, karena manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya lainnya (Grace *et al.*, 2024).

Peningkatan kualitas dan kesadaran warga desa menjadi modal penting dalam proses transformasi. SDM yang ada, termasuk aparatur desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan generasi muda, berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembangunan. Komitmen kepala desa dalam mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan rutin turut mempercepat adaptasi terhadap perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas manusia menjadi penggerak utama perubahan sosial dan kelembagaan di tingkat desa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur

No	Umur (Usia)	Jumlah (Jiwa)
1	< 12 Bulan	44
2	12 bulan – 5 Tahun	173
3	5 Tahun – 10 tahun	100
4	10 tahun – 25 tahun	555
5	25 tahun – 60 tahun	751
6	> 60 tahun	87
Jumlah		1.710

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah elemen-elemen penting yang sangat mempengaruhi aktivitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Faktor-faktor ini dapat berupa ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kemajuan inovasi, modal, teknologi, atau bahkan kebijakan pemerintah dan kondisi pasar yang memengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain untuk mendorong perubahan dan kemajuan ekonomi suatu wilayah atau negara secara keseluruhan (Mardiyani dan Izharudin, 2024).

Ekonomi desa mulai bertumbuh seiring dengan meningkatnya produksi pertanian dan diversifikasi sumber penghasilan masyarakat. Adanya dukungan dalam bentuk bantuan alat produksi, pelatihan UMKM, dan pembangunan akses pasar mendorong masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga. Pendapatan masyarakat pun secara bertahap meningkat, terutama bagi petani dan peternak. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap indeks ketahanan ekonomi dan menjadi dasar yang kuat untuk keluar dari kategori desa tertinggal.

Tabel 3. Ekonomi Desa Prode SP III

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1	Dana Desa (DD)	927.973.000
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	496.037.500
3	Pendapatan Asli Desa (PAD)	200.000.000
Jumlah		1.624.010.500

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan. Bagi birokrasi publik, pelayan publik (*public service*) merupakan salah satu perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat dan kesejahteraan suatu negara (*welfare state*) (Lestari dan Santoso, 2022).

Transformasi desa juga ditopang oleh perbaikan pelayanan publik, baik dari sisi fisik (infrastruktur layanan) maupun pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan). Pemerintah desa berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pengadaan sarana pendidikan (PAUD), penguatan posyandu, serta digitalisasi administrasi desa. Respons cepat terhadap kebutuhan warga serta transparansi dalam layanan publik menciptakan kepercayaan dan memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan masukan, memberikan tanggapan, menyumbangkan tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya, serta turut serta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam pembangunan, dengan partisipasi masyarakat yang aktif, kebijakan publik dapat lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat (Riyanto dan Kovalenko, 2023).

Tingginya keterlibatan warga dalam musyawarah, pembangunan fisik, dan pengawasan penggunaan dana desa menjadi kekuatan utama dalam proses transformasi. Gotong royong dan inisiatif lokal menjadi budaya kerja kolektif yang mendorong percepatan pembangunan. Warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dan pengontrol arah pembangunan desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi status Desa Prode SP III dari desa tertinggal menjadi desa berkembang merupakan hasil dari proses manajerial yang sistematis dan kolaboratif. Pemerintah Desa menerapkan prinsip-prinsip manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah partisipatif, pengorganisasian melibatkan kelembagaan desa yang aktif, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan dan gotong royong, serta pengendalian dilakukan melalui evaluasi berkala bersama masyarakat.

Lebih lanjut, keberhasilan transformasi desa juga sangat erat kaitannya dengan terpenuhinya enam indikator desa berkembang, yaitu peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan adopsi teknologi. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi desa bukan hanya hasil intervensi eksternal seperti dana desa, melainkan juga hasil dari tata kelola internal desa yang adaptif, responsif, dan berbasis potensi lokal.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Perlu mendorong penguatan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan tematik, pendampingan teknis, dan pemanfaatan teknologi digital. Evaluasi program dana desa sebaiknya tidak hanya fokus pada output fisik, tetapi juga dampaknya terhadap indeks pembangunan manusia dan pemberdayaan sosial.

2. Bagi Pemerintah Desa

Diperlukan upaya konsisten dalam memperkuat kelembagaan dan kapasitas SDM aparatur desa agar implementasi manajemen POAC dapat dijalankan lebih optimal. Penggunaan data desa berbasis teknologi informasi juga perlu ditingkatkan guna menunjang perencanaan dan evaluasi berbasis bukti (*evidence-based planning*).

3. Bagi Masyarakat Desa

Partisipasi aktif warga dalam setiap tahap pembangunan perlu terus ditingkatkan, tidak hanya dalam bentuk tenaga gotong royong, tetapi juga dalam pengawasan, perumusan kebijakan, dan inisiatif kewirausahaan berbasis komunitas.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi keterkaitan antara strategi POAC dan indikator SDGs Desa dalam jangka panjang. Pendekatan kuantitatif dengan analisis data longitudinal dapat memperkaya pemahaman tentang efektivitas tata kelola desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, D., Suratman, & Nursanti. (2024). Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Bengkulu dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik. *IAPA International Conference 2024: Towards World Class Bureaucracy*, 231-249.
- Amnurdiant, F.A., Firmansyah, R., Banjarnahor, R.B.S., Wahyudi, I., & Utomo, D.A. (2024). Transformasi Pembangunan Desa di Indonesia: Melalui Pendekatan Top-Down ke Partisipatif dalam Kerangka UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11): 1-11.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Benany, P.F.E., & Widyastuty, (2020). Kajian Desa Tertinggal Menurut Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2016. *Jurnal Teknik WAKTU*, 18(1): 26-38.
- Grace, V., Lay, A.C., Hardini, A.T.H., & Rizky, B.A. (2024). Pentingnya Perencanaan Sumber Daya Manusia Dalam Sebuah Organisasi. *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)*, 2(2): 144-155.

- Handrain, H., Frinald, A., Magriasti, L., & Hendranaldi. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 11(2): 601-608.
- Irham, F., Dairobby, M.Z., Fauzan, R.G., & Pramasha, R.R. (2024). Peran Sumber Daya Alam Dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(11): 1-17.
- Lestari, R.A., & Santoso, A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(1): 43-55.
- Mardiyani, S., & Izharudin. (2024). Pengaruh Infrastruktur, Belanja Pariwisata, Dan Investasi Domestik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 10(1): 296-310.
- Mazaya, N.N., & Suliswaningsih. (2023). Perancangan UI/UX Aplikasi “Dengerin” Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking. *KOMPUTA : Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 12(2): 39-49.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S.P., & Hasibuan, A. (2023). Strategi Inovasi Pembangunan Desa Tertinggal Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademik*, 1(3): 5-23.
- Rasyid, A., Mustamin, & Prasetyo, T.B. (2023). Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Tertinggal di Kecamatan Lembang. *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 3(1): 151-161.
- Rianto, P. (2020). *Modul Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Komunikasi UII.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2): 374-388.
- Suhartono, & Citra, N.Y. (2022). Transformasi Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri. *National Multidisciplinary Sciences: UMJember Proceeding Series*, 1(1): 60-62.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, M. (2020). Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM) (Studi Kasus: Desa Pongkok, Kecamatan Palohharjo, Kabupaten Klaten). *Prosiding Seminar Edusainstech (FMIPA UNIMUS 2020)*: 533-541.